

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

bangga
melayani
bangsa



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		i
DAFTAR LAMPIRAN		ii
DAFTAR TABEL		iv
KATA PENGANTAR		v
RINGKASAN EKSEKUTIF		vii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Isu-isu Strategis	5
1.5	Cascading Kinerja	6
1.6	Peta Proses Bisnis	7
1.7	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		10
2.1	Rencana Strategis	10
2.2	Tujuan dan sasaran	11
2.3	Kebijakan, Strategi dan Program	13
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		18
A	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	18
3.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	20
3.2	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	21
3.3	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra	26
3.4	Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional	28
3.5	Analisa penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi	28
3.6	Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	32
3.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33

B	Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP		37

DAFTAR LAMPIRAN..... 40

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	40
2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas.....	41
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	45
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 beserta lampiran perubahan.....	55
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	66
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	8
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026	13
Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024	14
Tabel 2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai	15
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024	15
Tabel 2.6 Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dumai TA. 2024	16
Tabel 2.7 Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dumai Perubahan TA 2024	17
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja	19
Tabel 3.2 Atribut Capaian Indikator Kinerja	20
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	23
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	28
Tabel 3.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	32
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
Tabel 3.8 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024	34

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



DA PRAYAMA PUTRA, S.STP

Pembina Tk. I

NIP 19840511 200212 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka sebagai unsur teknis, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menjalankan fungsi

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
- b. Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
- c. kepemimpinan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan atau aparatur lainnya;

- f. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota;
- g. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakan Peraturan Daerah);
- h. pengikutan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- i. pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan tamu negara;
- j. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wali kota;
- l. pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- m. pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- n. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
- o. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing masing;
- p. pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- q. pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- r. pemfasilitasian tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- s. pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang

- diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- t. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
 - u. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - v. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan MISI yang ke IV RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik”** dan SASARAN yang ke 2 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu **“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik “**

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai 2021 - 2026.telah menetapkan 1 (Satu.) Tujuan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 2 (dua) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dumai Tahun 2024 antara lain:

- I. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. **Kegiatan:** Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi

Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan

- Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

2. **Kegiatan:** Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3. **Kegiatan:** Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. **Kegiatan:** Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. **Kegiatan:** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis dan Prognosis Realisasi Anggaran

3. **Kegiatan:** Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. **Kegiatan:** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 5. **Kegiatan:** Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. **Kegiatan:** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 7. **Kegiatan:** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. **Kegiatan:** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 mengalami 1 (Satu) kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5**Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan masyarakat	a. Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%
		b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%
		c. Persentase Penegakan Peraturan Daerah	100%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp13.540.562.420,- (*tiga belas milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah*) untuk melaksanakan 2 (dua) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.6**Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dumai TA. 2024**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.781.016.120	APBD
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1,566,567,100	APBD

J U M L A H	Rp. 11.347.583.220	APBD
--------------------	---------------------------	------

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.762.471.620	APBD
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.778.090.800	APBD
J U M L A H		Rp. 13.540.562.420	APBD

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketentraman	100%	100%	Tetap	Sangat Berhasil	-	-	-

Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	dan Perlindungan Masyarakat							
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	100%	Tetap	Sangat Berhasil	-	-	-
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	100%	60%	Meningkat	-	-	Cukup Berhasil	-

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori SANGAT EFISIEN yaitu Sangat Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 13.540.562.420,00 (*Tiga Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) bersumber dari APBD. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. Rp. 13.403.787.860,00 (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp.136.774.560,00 (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).

1. Belanja Operasi : Rp. 13.403.787.860,00
2. Belanja Modal : Rp. 136.774.560,00

J u m l a h : Rp. 13.540.562.420,00

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tahun 2024

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	96,29%	Rp1.111.480.000,-	Rp1.070.268.000,-	96,29%
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	100%	98,96%	Rp1.388.948.100,-	Rp1.374.514.692,-	98,96%
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah.	100%	60%	97,84%	Rp277.662.700	Rp271.665.000,-	97,84%

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KETERANGAN
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%	96,29	103,85	%	Sangat Efisien
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	98,96	101	%	Sangat Efisien
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah.	60%	97,84	61,32	%	Kurang Efisien

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (103,85%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**
2. Pada *Indikator Kinerja Utama* Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan persentase tingkat efisiensinya

adalah (101%) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (98,96%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**

3. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Penegakan Peraturan Daerah, persentase tingkat efisiensinya adalah (61,32%) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (60%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (97,84%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
 5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilities) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 21 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
2. pemimpinan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

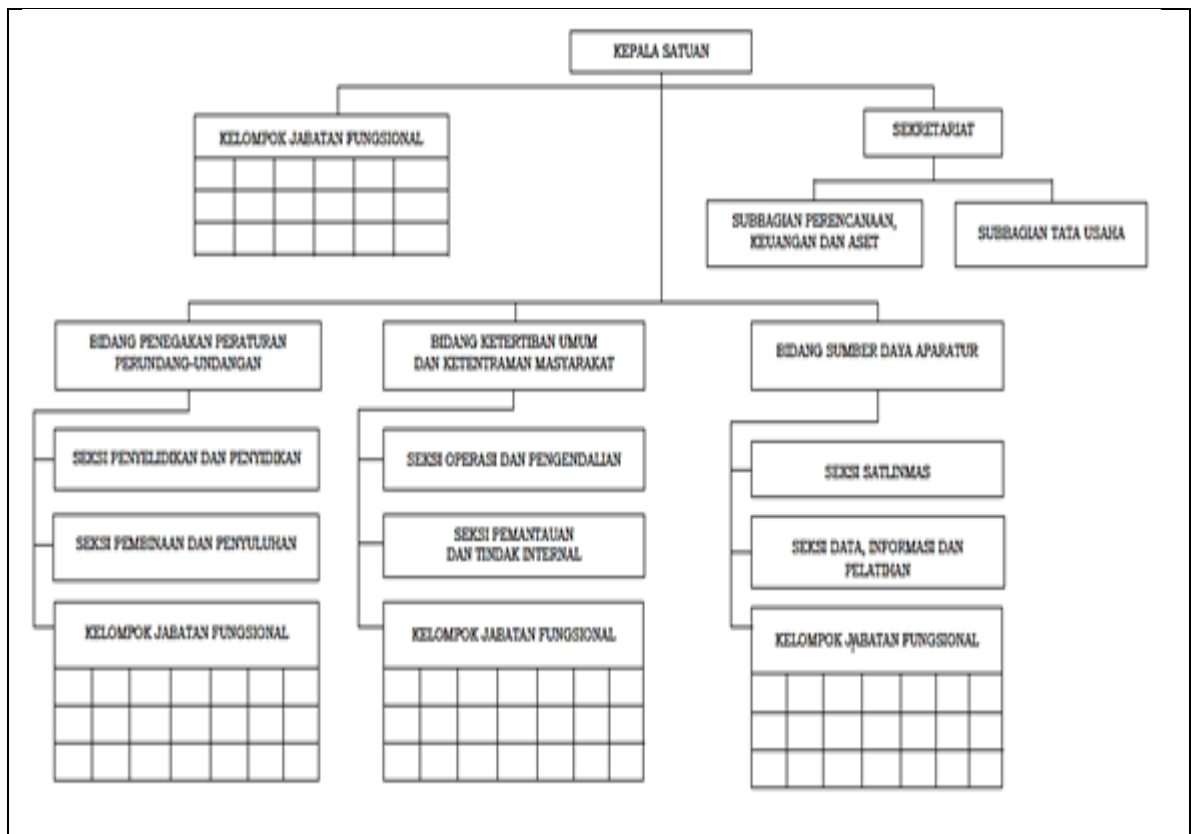
3. penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
4. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan atau aparaturnya;
5. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota;
6. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakan Peraturan Daerah);
7. pengikutan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
8. pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan tamu negara;
9. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wali kota;
11. pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
12. pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
13. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai terdiri dari :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-undangan, membawahi:

- a. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
- a. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Kepala Seksi Pemantauan dan Tindak Internal; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:
- a. Kepala Seksi Satlinmas;
 - b. Kepala Seksi Data Informasi dan Pelatihan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang perlu ditangani sbb:

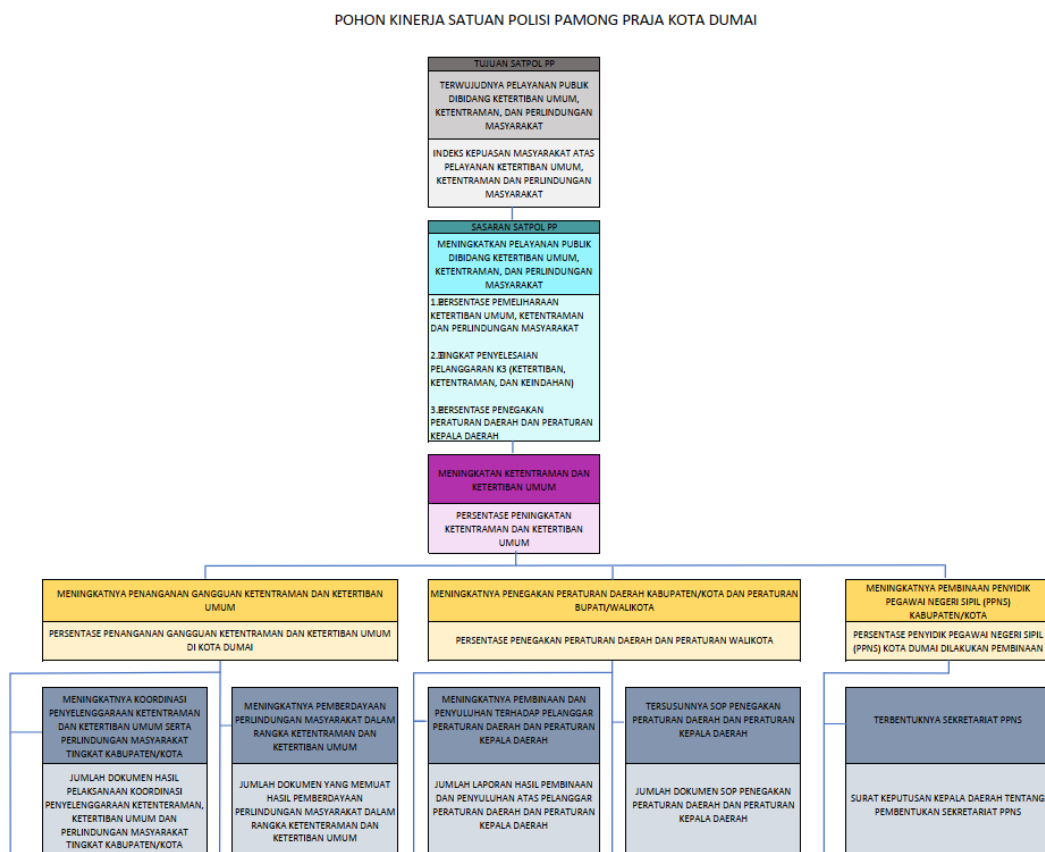
1. Masih kurangnya SDM yang berkompentensi dalam Penegakkan Peraturan Daerah khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
2. Koordinasi antar instansi lemah;
3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
5. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
6. Jumlah anggota Satpol PP yang belum memadai;
7. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
8. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
9. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan;

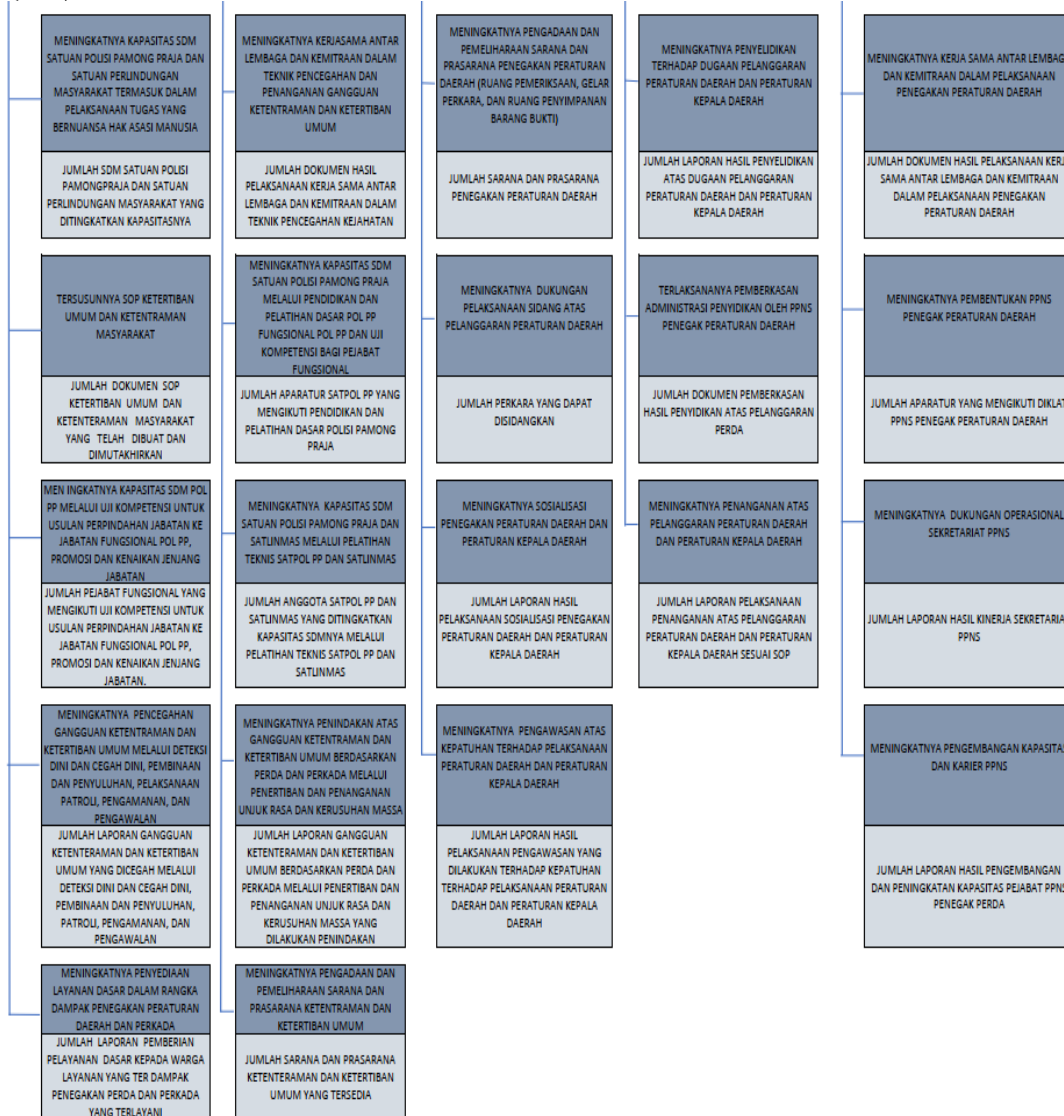
10. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
11. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba;
12. Kenakalan remaja dan pelajar.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.2
Cascading Satuan Polisi Pamong Praja

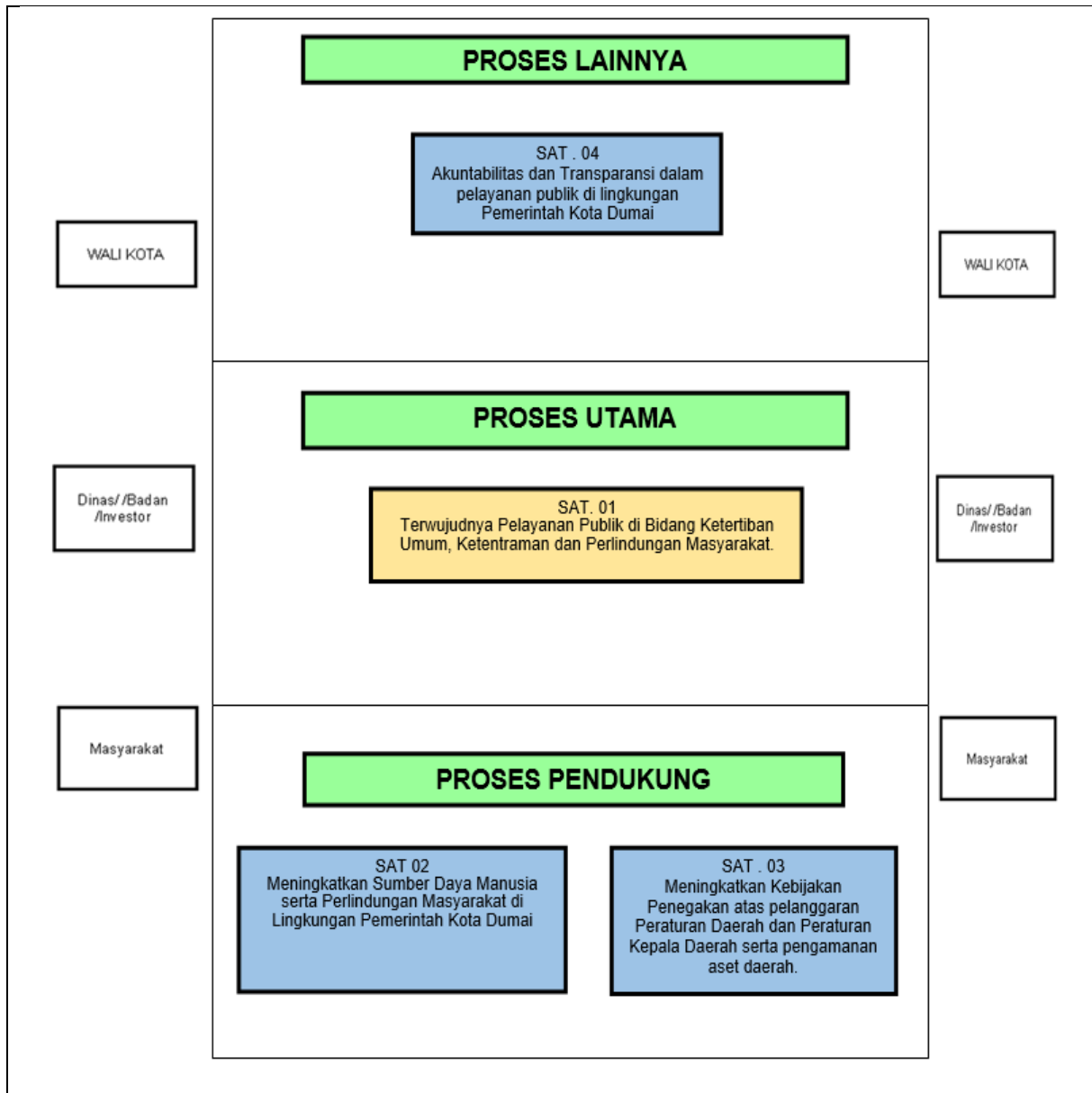




1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.3
Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja



(sesuaikan peta proses bisnis PD masing-masing)

1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1309.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal 4, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/ EVIDEN
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai diharapkan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai baik jangka pendek menengah maupun jangka panjang pada website atau media sosial resmi Satpol PP Kota Dumai	Mengupload Renja dan Renstra di website resmi Satpol PP	Februari 2024	Februari 2024	Bid SDA (Seksi Data dan Informasi)	Output Sudah tercapai	https://satpolpp.dumaikota.go.id/informasi/dokumen
2	Seluruh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai merumuskan perencanaan kinerja berupa Perjanjian Kinerja (PK 2023)	Membuat PK dari Eselon II, Eselon III, Eselon IV, hingga Staff	September 2023	September 2023	Pimpinan dan Seluruh ASN Satpol PP	Output Sudah tercapai	https://drive.google.com/drive/folders/1hRLsKunmf8IDtM4t25PNpoMAcc5OpT8A?usp=share_link
3	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai diharapkan mencantumkan realisasi rencana aksi dalam monev rencana aksi 2023 hingga TW 3 tahun 2023	Menyusun rencana aksi dan monev rencana aksi	Desember 2023	Desember 2023	Sekretariat Satpol PP	Output Sudah tercapai	https://drive.google.com/file/d/11cy4zDGOP1xVSNrSfHZ7fxrNiSmoTQ2S/view?usp=sharing
4	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai diharapkan melampirkan hasil evaluasi kinerja pada e kinerja (satu sampel individu) dan lembar pembayaran TPP individu (sampel satu bulan)	Sampel Evaluasi Kinerja dan Pembayaran TPP	Desember 2023	Desember 2023	Sekretariat Satpol PP	Output Sudah tercapai	https://drive.google.com/file/d/1txt7hrN_-GdBq312L0K62vWpZWL1JaXs/view?usp=drive_link
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai diharapkan membuat dan melampirkan tabel evaluasi renstra PD atau tabel pengendalian (dalew renstra) Perangkat Daerah 2021-2026	Sudah Melampirkan Tabel Evaluasi Renstra	Desember 2023	Desember 2023	Sekretariat Satpol PP	Output Sudah tercapai	https://drive.google.com/file/d/1hl57fFnh5kJ6-DGqO0uEuPaSHO3xnr2/view?usp=sharing

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong,

yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 2.1



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021–2026 menyesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026

IKU WALI KOTA			IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Meningkatkan Reformasi Birokrasi dengan indikator <i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terwujudnya Pelayanan Publik Di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dengan Indikator <i>Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat</i>	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat
					Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)
					Persentase Penegakan Peraturan Daerah

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke IV : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.	Meningkatkan pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah.
			Meningkatkan Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah. Dengan cara Penempatan Petugas Satpol PP di beberapa Kelurahan sebagai bentuk upaya Percepatan Respon Terhadap Pengaduan Masyarakat (Pamongbin Trantibmas).
			Adanya Pelaksanaan dalam Penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa
			Peningkatan dalam hal pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat - tempat penting rumah dinas pejabat serta acara - acara resmi
			Adanya pelaksanaan pengoordinasian kerja sama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di bidang Sumber Daya Aparatur serta sumber daya anggota Perlindungan Masyarakat.
			Adanya Kegiatan " Prajawati Goes To School " yang merupakan kegiatan cegah dini yang ditujukan bagi anak - anak remaja.
			Peningkatan dalam Penertiban ODGJ dan GEPENG
			Peningkatan dalam Penertiban Pasar
SDM Aparatur Internal	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.	Melaksanakan Peningkatan Sumber Daya Manusia, serta Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Kota Dumai	Meningkatkan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kegiatan Kesamaptaaan Bagi Personil Satpol PP
			Adanya perekrutan personil untuk pelaksanaan tugas pelayanan publik yang lebih optimal.
			Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk pembinaan dan pelatihan personil dalam hal Ketertiban Umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
			Adanya pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Polisi Pamong Praja
Peningkatan kapasitas pengamanan aset daerah	Meningkatkan Kebijakan Penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Melaksanakan Kebijakan Penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Peningkatan dalam penanganan atas pelanggaran penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
			Peningkatan Pengawasan pemantauan terhadap pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelayanan publik	Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelayanan publik	Melaksanakan Akuntabilitas yang transparansi di lingkungan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas yang transparansi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketentraman dan Perlindungan Masyarakat 2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) 3. Persentase Penegakan Peraturan Daerah

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100 %
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100 %
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah	100 %

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp13.540.562.420,- (*tiga belas milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah*) untuk melaksanakan 2 (dua) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.6
Program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dumai TA. 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.781.016.120	APBD
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1,566,567,100	APBD
J U M L A H		Rp. 11.347.583.220	APBD

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal ...September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
 Program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dumai
 Perubahan TA. 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.762.471.620	APBD
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.778.090.800	APBD
J U M L A H		Rp. 13.540.562.420	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus : $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus : $capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum ketentraman dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah jumlah laporan dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diterima sebanyak 70 laporan dan yang ditindak lanjuti sebanyak 70, realisasi sebesar 100%, tercapai atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 cenderung tetap.

Efisiensi Anggaran	3,71%
Nilai Anggaran	Rp. 1.111.480.000
Capaian 2024	Rp. 1.070.268.000 (96,29%)
Target	100 %
Realisasi	100 %

b. Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)

Capaian kinerja untuk indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan

sebanyak 802 kasus dari 802 kasus pelanggaran yang ditemukan, realisasi sebesar 100% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 adalah tetap.

Efisiensi Anggaran	1,04%
Nilai Anggaran	Rp. 1.388.948.100
Capaian 2024	Rp. 1.374.514.692 (98,96%)
Target	100%
Realisasi	100%

c. Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah.

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah dari jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi sebanyak 20 Peraturan Daerah, realisasi sebesar 12 Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan, tercapai 60% atau bernilai kinerja sedang. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 16 Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan dari 49 Peraturan Daerah yang memuat sanksi atau tercapai sebesar 32,65%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 27,35%

Efisiensi Anggaran	2,16%
Nilai Anggaran	Rp. 277.662.700
Capaian 2024	Rp. 271.665.000 (97,84 %)
Target	100%
Realisasi	60%

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

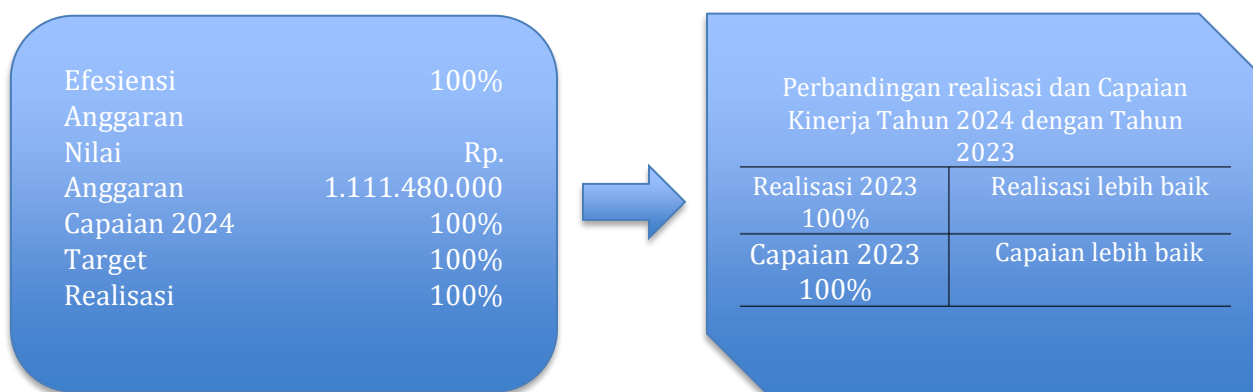
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
			dst	2022	2023	2024	dst	2022	2023	2024	dst	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketentraman dan Perlindungan Masyarakat		100%	100%	100%		100%	100%	100%		100%	100%	100%
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)		100%	100%	100%		100%	100%	100%		100%	100%	100%
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah		100%	100%	100%		30,88%	32,65%	60%		30,88%	32,65%	60%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

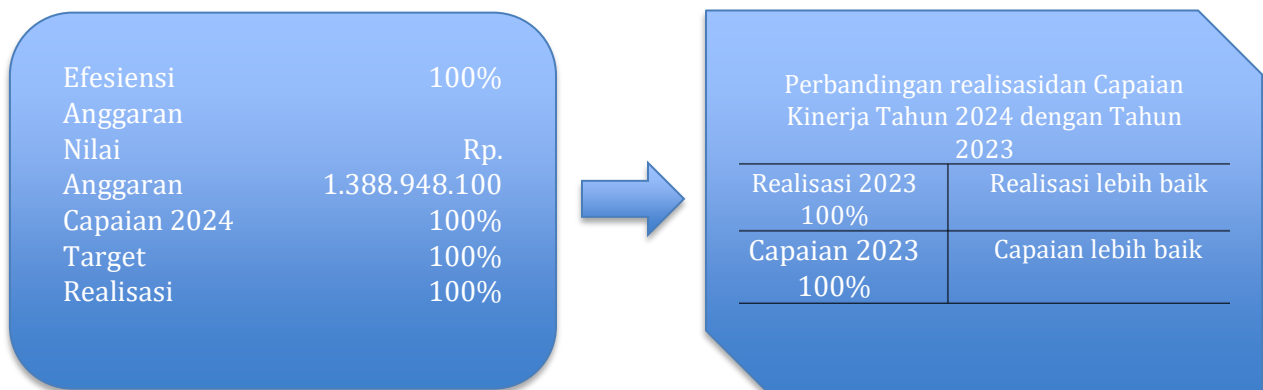
1. a. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dengan target pada tahun 2022 adalah 100% berasal dari perhitungan Jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang di tindak lanjuti dibagi dengan jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima. Dalam tahun 2022, jumlah laporan dari gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima sebanyak 37 laporan dan yang ditindak lanjuti sebanyak 37, capaian kinerja sebesar 100%.

b. Pada tahun 2023 Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, Realisasi pada tahun 2023 adalah jumlah laporan dari gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima sebanyak 45 laporan dan yang ditindak lanjuti sebanyak 45, capaian kinerja sebesar 100%.

c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 100% dan realisasinya adalah 100% dengan rincian jumlah laporan dari gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima sebanyak 70 laporan dan yang ditindak lanjuti sebanyak 70, capaian kinerja sebesar 100%.



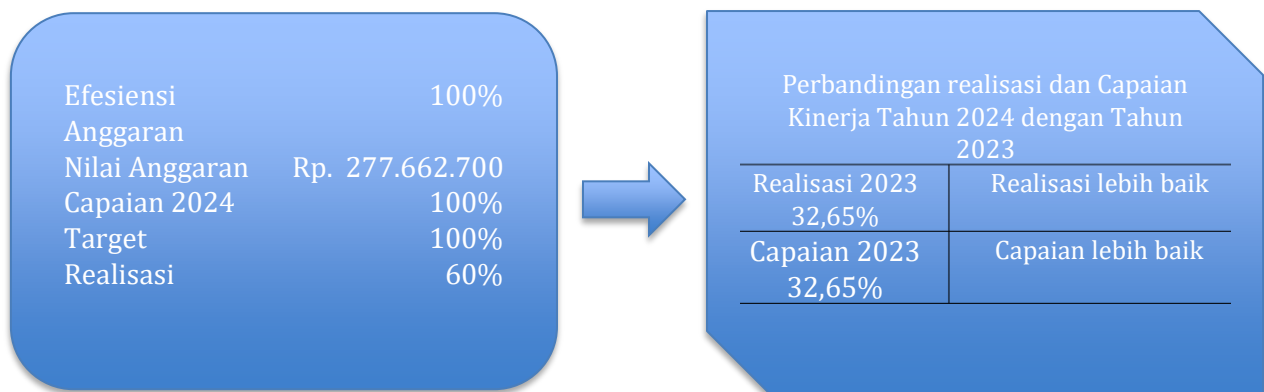
- 2 a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) yang diperoleh dari perhitungan Jumlah Pelanggaran K3 yang di selesaikan dibagi dengan Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) yang di temukan. Untuk tahun 2022 tingkat penyelesaian pelanggaran K3, jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan sebanyak 1.164 kasus dari 1.164 kasus pelanggaran yang ditemukan, capaian kinerja 100%.
- b. Untuk tahun 2023 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan), jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan sebanyak 1.710 kasus dari 1.710 kasus pelanggaran yang ditemukan, dengan capaian kinerja 100%.
- c. Pada tahun 2024 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan), dengan rincian jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan sebanyak 802 kasus dari 802 kasus pelanggaran yang ditemukan, capaian kinerja 100%.



3. a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Persentase penegakan Peraturan Daerah, diperoleh dari perhitungan Jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan di bagi dengan jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi. Untuk indikator persentase penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2022, jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan sebanyak 21 dari 68 Peraturan Daerah, capaian kinerja 30,88%.
- b. Untuk indikator persentase penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2023, jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan sebanyak 16 dari 49 Peraturan Daerah, capaian kinerja 32,65%.
- c. Untuk indikator persentase penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2024,

jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan sebanyak 12 dari 20 Peraturan Daerah, capaian kinerja 60%.

Rendahnya capaian kinerja Persentase Penegakan Peraturan Daerah disebabkan karena Tidak Semua Perda yang memuat Sanksi di tegakkan oleh Satpol PP, sebagian Peraturan tersebut hanya di tegakkan oleh OPD Pengampunya.

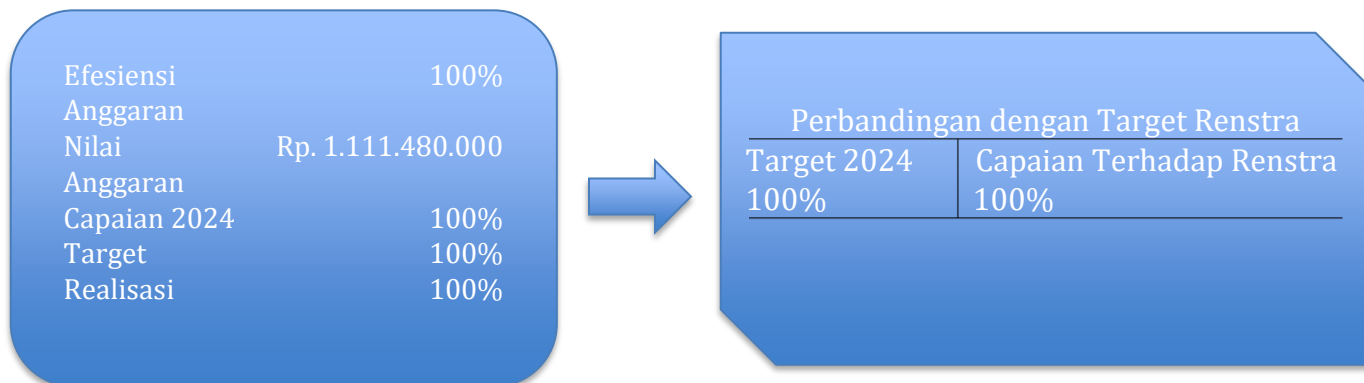


3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu:

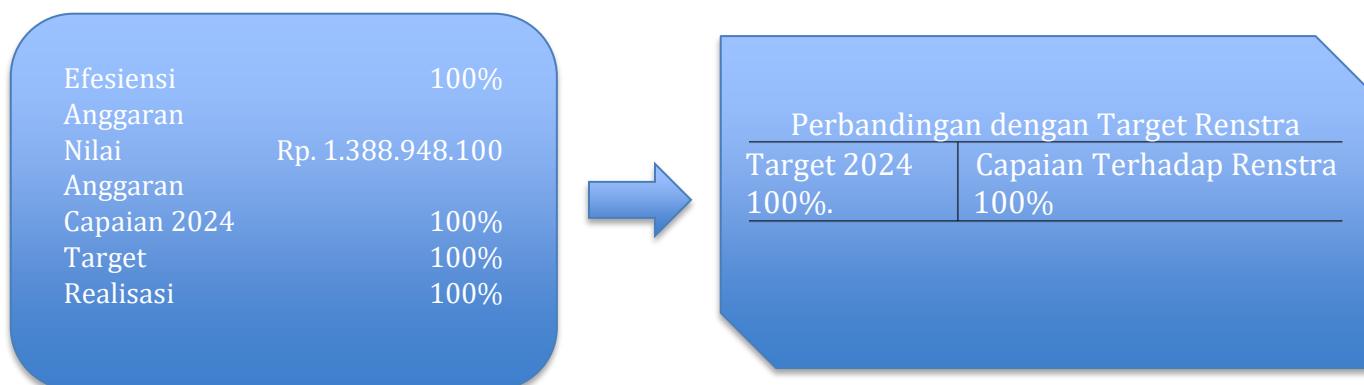
a. Indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 100 poin dan terealisasi 100 poin pada tahun 2024



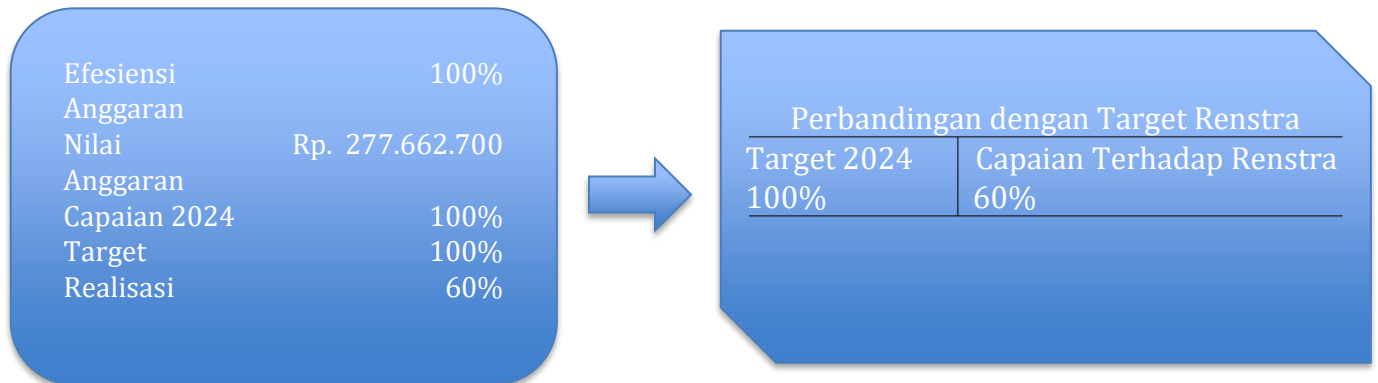
b. Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) tahun 2024 sudah melebihi/cukup/kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 100 poin dan terealisasi 100 poin pada tahun 2024



c. Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tahun 2024 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 60% dari target Renstra sebesar 100 poin dan terealisasi 60 poin pada tahun 2024



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%	-	Tidak ada Standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Satpol PP
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	-	
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30,88%	-	

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

1. Indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan

realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 cenderung tetap.

- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.** Sesuai dengan target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya Petugas Pamong Bintrantibmas, sebagai salah satu upaya reaksi cepat terhadap Penanganan Laporan Gangguan Trantibmas di masyarakat.
- Petugas Patroli Harian secara langsung akan digerakkan dalam mengatasi laporan gangguan trantibmas di tempat yang belum dijangkau oleh petugas Pamong Bintrantibmas.

- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat** adalah sebagai berikut:

- Petugas Pamong Bintrantibmas sampai saat ini masih terbatas di kelurahan Dumai Kota saja. Hal itu dikarenakan masih terbatasnya Anggaran yang tersedia serta keterbatasan jumlah Anggota yang tersedia saat ini.
- Kendaraan Patroli yang sudah cukup tua, sehingga sering mengalami kerusakan cukup menghambat pergerakan petugas patroli.

- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat** adalah sebagai berikut:

- Merekrut/ Menambah Jumlah Personil Satpol PP, serta mengupayakan penambahan anggaran untuk perawatan Kendaraan.

2. Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 bersifat tetap.

- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Tingkat Penyelesaian**

Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan). sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukannya Patroli Rutin dalam hal menindaklanjuti Laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran Perda/Perkada dan juga dalam Penanganan Gangguan Trantibum dan di lingkungan Kota Dumai
- Terbentuknya Pamong Bintrantibmas yang di tempatkan disetiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Dumai Kota, dimana Petugas tersebut khusus menerima pelaporan masyarakat dalam penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di lingkungan masyarakat di kelurahan masing masing.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) adalah sebagai berikut:

- Kondisi Kendaraan Patroli yang jumlahnya sangat terbatas dan sudah cukup tua, sehingga sering mengalami kerusakan cukup menghambat pergerakan petugas patroli.
- Petugas Pamong Bintrantibmas sampai saat ini masih terbatas di kelurahan Dumai Kota saja. Hal itu dikarenakan masih terbatasnya Anggaran yang tersedia serta keterbatasan jumlah Anggota yang tersedia saat ini.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) adalah sebagai berikut:

- Merekrut/ Menambah Jumlah Personil Satpol PP, serta mengupayakan penambahan anggaran untuk perawatan Kendaraan.

3. Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 60%, tercapai 60% atau bernilai kinerja rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 32,65%.atau tercapai sebesar 32,65%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 54,42%

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** kurang dari target yang

telah ditentukan adalah sebagai berikut:

Untuk Indikator Kinerja Utama persentase penegakan Peraturan Daerah tidak dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu Perda yang di tegakkan hanya 12 Perda memuat sanksi dari keseluruhan 20 Perda Kota Dumai yang memuat sanksi.

- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Rendahnya capaian pada indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah dikarenakan perhitungan persentasenya diperoleh dari rumus Jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan dibagi dengan jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi. Dalam hal ini tidak semua Perda yang memuat Sanksi di tegakkan oleh Satpol PP, sebagian Peraturan tersebut hanya di tegakkan oleh OPD Pengampunya.

- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- Pentingnya dibentuk Tim Terpadu Percepatan Penegakan Peraturan Daerah Kota Dumai Yang Didalamnya Terdiri Dari Seluruh Skpd Pemangku Perda yang memuat Ketentuan Sanksi Pidana

- Akan segera dibentuknya Sekretariat PPNS yang berkedudukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, yang bertugas dalam hal melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidik penegakan peraturan perundang - undangan didaerah.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan taupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat.	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	100	%	Rp1.111.480.000,-	Rp1.070.268.000,-	96,29
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)				100	100	%	Rp1.388.948.100,-	Rp1.374.514.692,-	98,96
3	Persentase Penegakan Peraturan Daerah.				100	60	%	Rp277.662.700,-	Rp271.665.000,-	97,84

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%	96,29
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	98,96
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah.	60%	97,84

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut::

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama Pertama yaitu Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat* tingkat efisiensinya adalah 103,85% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (96,29%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama kedua yaitu Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)* tingkat efisiensinya adalah 101% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (98,96%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;

- c. Pada *Indikator Kinerja Utama ketiga yaitu Persentase Penegakan Peraturan Daerah* tingkat efisiensinya adalah 61,32% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (60%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (97,84%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran(Rp)	Realisasi
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.778.090.800	2.717.797.692
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	2.437.296.100	2.383.541.592
1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.325.816.100	1.313.273.592
2	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	1.081.480.000	1.040.768.000
3	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	30.000.000	29.500.000
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	277.662.700	273.015.000
1	Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	79.941.000	77.932.000

	2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	167.722.300	165.986.000
	3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.999.400	29.097.000
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	63.132.000	61.241.100
	1	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	63.132.000	61.241.100
2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.762.471.620	9.955.128.294
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.976.100	15.464.400
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.200	2.700.000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.496.000	2.297.600
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.993.400	1.500.000
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.493.400	2.399.000
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.995.700	2.250.000
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.998.400	4.317.800
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.573.329.720	6.383.185.431
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.526.828.720	6.339.840.948
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.307.100	20.724.783
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.221.100	20.219.700
	4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis dan Prognosis Realisasi Anggaran	3.972.800	2.400.000
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.580.700	11.494.000
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	3.402.800	3.401.000
	2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.399.300	4.239.000
	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.778.600	3.854.000

	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.445.000	28.500.000
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	29.445.000	28.500.000
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	654.299.200	628.093.900
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.423.000	22.272.400
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.864.700	61.431.500
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.999.900	113.778.000
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.651.600	12.252.000
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.360.000	27.360.000
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391.000.000	391.000.000
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.774.560	0
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.774.560	0
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.683.220.340	2.448.780.967
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.800.000	6.800.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.000.000	135.833.207
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.000.000	228.000.000
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.304.420.340	2.078.147.760
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.846.000	439.609.596
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.000.000	38.000.000
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	374.026.000	373.673.596
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.820.000	27.936.000
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	0

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi, hal ini tercermin dari dapat dilaksanakannya tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026 yang harus diwujudkan dalam tahun 2024 melalui pelaksanaan 2 (dua) program 11 (sebelas) kegiatan dan 36 (tiga Puluh Enam) sub Kegiatan. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Satpol PP Kota Dumai beserta dukungan para staf dilingkungan Satpol PP Kota Dumai untuk mencapai sasaran yang ditetapkan tahun 2024, disamping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait.

Untuk Tahun 2024, ditetapkan 3 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari masing-masing indikator tersebut pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Tahun 2024 target kinerja adalah 100% berasal dari perhitungan Jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang di tindak lanjuti dibagi dengan jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima. dengan rincian jumlah laporan dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diterima sebanyak 70 laporan dan yang ditindak lanjuti sebanyak 70, capaian kinerja sebesar 100%.

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan).

Untuk tahun 2024 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) diperoleh dari perhitungan Jumlah Pelanggaran K3 yang di selesaikan dibagi dengan Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) yang di temukan. dengan rincian jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan sebanyak 802 kasus dari 802 kasus pelanggaran yang ditemukan, capaian kinerja 100%.

3. Persentase Penegakan Peraturan Daerah.

indikator persentase penegakan Peraturan Daerah diperoleh dari perhitungan Jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan di bagi dengan jumlah

Peraturan Daerah yang memuat sanksi. Untuk tahun 2024, jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan sebanyak 12 dari 20 Peraturan Daerah, capaian kinerja 60%.

Rendahnya capaian kinerja Persentase Penegakan Peraturan Daerah disebabkan karena Tidak Semua Perda yang memuat Sanksi di tegakkan oleh Satpol PP, sebagian Peraturan tersebut hanya di tegakkan oleh OPD Pengampunya saja.

Adapun permasalahan dan pemecahan masalah yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada sub urusan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Permasalahan :

- Petugas Pamong Bintrantibmas dibentuk sebagai salah satu upaya reaksi cepat terhadap Penanganan Laporan Gangguan Trantibmas di masyarakat, yang mana Petugas Pamong Bintrantibmas ini ditempatkan langsung di tengah masyarakat dalam hal ini satu orang petugas di beri tanggung jawab memantau permasalahan di satu kelurahan yang ditunjuk. Namun, Petugas Pamong Bintrantibmas sampai saat ini masih terbatas di kelurahan yang ada di kecamatan Dumai Kota saja dikarenakan masih terbatasnya Anggaran yang tersedia serta keterbatasan jumlah Anggota Satpol PP yang ada saat ini.

Sedangkan untuk area lain yang belum terjangkau petugas Pamong Bintrantibmas apabila ada laporan mengenai gangguan Trantibum, akan ditindaklanjuti oleh petugas Patroli yang bertugas pada hari itu.

- Usia Kendaraan Patroli yang sudah cukup tua, sehingga sering mengalami kerusakan serta memerlukan biaya perawatan kendaraan yang cukup besar seringkali menghambat pergerakan petugas patroli.
- Rendahnya capaian pada indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah dikarenakan perhitungan persentasenya diperoleh dari rumus Jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan dibagi dengan jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi. Dalam hal ini tidak semua Perda yang memuat Sanksi di tegakkan oleh Satpol PP, sebagian Peraturan tersebut hanya di tegakkan oleh OPD Pengampunya.

Pemecahan Masalah/ Solusi :

- Merekrut/ Menambah Jumlah Personil Satpol PP, serta mengupayakan penambahan anggaran untuk perawatan Kendaraan.
- Pentingnya dibentuk Tim Terpadu Percepatan Penegakan Peraturan Daerah Kota Dumai Yang Didalamnya Terdiri Dari Seluruh Skpd Pemangku Perda yang memuat Ketentuan Sanksi Pidana
- Akan segera dibentuknya Sekretariat PPNS yang berkedudukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, yang bertugas dalam hal melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidik penegakan peraturan perundang - undangan didaerah

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA



UDA PRATAMA PUTRA, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19840511 200212 1 001

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2022-2026

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21
TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang di tindak lanjuti 100% jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang di tindak lanjuti 100% jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.	Meningkatkan pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh daerah.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	
		Jumlah Pelanggaran K3 yang di selesaikan X100% Jumlah Pelanggaran K3 X100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	Jumlah Pelanggaran K3 yang di selesaikan X100% Jumlah Pelanggaran K3 X100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan Peningkatan Sumber Daya Manusia, serta Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Kota Dumai	Peningkatan dalam penanganan atas pelanggaran penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	1. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketertiban Umum	
		Jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan X100% jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi X100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan X100% jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi X100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan Akuntabilitas yang transparansi di lingkungan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas yang transparansi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai		

Dumai, Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DUMAI

YUDHA PRATAMA PUTRA, S.STP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19840511 200212 1 001



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Misk Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	3.402.800,00	3.402.800,00	-597.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/ekonomi Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Misk Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	4.399.300,00	4.399.300,00	-1.100.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/ekonomi Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Misk Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.778.600,00	4.778.600,00	-221.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/ekonomi Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-	0,00	0,00	29.445.000,00	29.445.000,00				05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.01.2.05.0002			Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-	1 Paket	0,00	0,00	29.445.000,00	29.445.000,00				05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	607.145.000,00	506.436.000,00	654.299.200,00	47.154.200,00					ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		522.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	1 Paket	28.500.000,00	23.423.000,00	23.423.000,00	-5.077.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/ekonomi Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	1 Paket	62.000.000,00	61.904.600,00	83.864.700,00	21.864.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/ekonomi Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	74.726.800,00	114.999.900,00	39.999.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/ekonomi Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	22.500.000,00	13.651.600,00	13.651.600,00	-8.848.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/ekonomi Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Dokumen	12 Dokumen	27.500.000,00	27.360.000,00	27.360.000,00	-140.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/ekonomi Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			27.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	391.645.000,00	305.370.000,00	391.000.000,00	-645.000,00	Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/ekonomi Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			280.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.07			Pengadaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	125.208.000,00	0,00	136.774.500,00	11.566.500,00					ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		325.208.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	125.208.000,00	0,00	0,00	-125.208.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/ekonomi Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			125.208.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Meubel Lainnya				-	10 Unit	0,00	0,00	136.774.500,00	136.774.500,00		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.311.239.829,00	2.304.948.800,00	2.683.220.340,00	371.980.511,00					ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		1.718.225.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		7.000.000,00	SATUAN POLISI FAMONG PRAJA		
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	109.980.000,00	144.000.000,00	34.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI FAMONG PRAJA		
1.05.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	168.540.000,00	163.740.000,00	228.000.000,00	59.460.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		126.000.000,00	SATUAN POLISI FAMONG PRAJA		
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.023.899.829,00	2.024.428.800,00	2.304.420.340,00	278.520.511,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		1.485.225.000,00	SATUAN POLISI FAMONG PRAJA		
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara				100 %	100 %	389.090.000,00	350.730.000,00	650.846.000,00	261.756.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN SATUAN POLISI FAMONG PRAJA	1.143.530.000,00	SATUAN POLISI FAMONG PRAJA		
1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.330.000,00	19.000.000,00	38.000.000,00	-930.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		38.530.000,00	SATUAN POLISI FAMONG PRAJA		
1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				12 Unit	12 Unit	293.960.000,00	292.910.000,00	374.026.000,00	78.466.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI FAMONG PRAJA		
1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	55.000.000,00	38.820.000,00	38.820.000,00	-16.180.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		55.000.000,00	SATUAN POLISI FAMONG PRAJA		
1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		750.000.000,00	SATUAN POLISI FAMONG PRAJA		
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan keterampilan dan ketertiban umum				100 %	100 %	1.725.400.000,00	1.566.567.100,00	2.778.090.800,00	-611.350.000,00						1.114.050.000,00			
1.05.02.2.01		Penanganan Gangguan Keterterangan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Keterterangan dan Ketertiban Umum di Kota Dumai				12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.378.500.000,00	1.247.846.100,00	2.437.296.100,00	1.058.796.100,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	507.250.000,00	SATUAN POLISI FAMONG PRAJA		
1.05.02.2.01.0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keterterangan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Kemasuk Asas Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keterterangan dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	761.650.000,00	631.026.100,00	1.325.816.100,00	564.166.100,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		120.000.000,00	SATUAN POLISI FAMONG PRAJA		
1.05.02.2.01.0015		Pencegahan Gangguan Keterterangan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Petaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Keterterangan dan Ketertiban Umum yang Ditegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				20 Laporan	20 Laporan	586.850.000,00	586.820.000,00	1.081.480.000,00	494.630.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		362.250.000,00	SATUAN POLISI FAMONG PRAJA		
1.05.02.2.01.0016		Penindakan Atas Gangguan Keterterangan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Urjuk Rasa dan Kenusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Keterterangan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Urjuk Rasa dan Kenusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Laporan	10 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		25.000.000,00	SATUAN POLISI FAMONG PRAJA		
1.05.02.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota				100 %	3 Kegiatan	250.000.000,00	249.739.000,00	277.662.700,00	27.662.700,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	495.000.000,00	SATUAN POLISI FAMONG PRAJA		
1.05.02.2.02.0004		Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Petanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		18		19	20	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 laporan	1 laporan	50.000.000,00	49.941.000,00	79.941.000,00	29.941.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0007			Penyidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0008			Dukungan Pelaksanaan Bidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				1 laporan	1 laporan	30.000.000,00	29.880.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0009			Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNNS Penegak Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0010			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.918.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0011			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	167.722.300,00	137.722.300,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0012			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	29.999.400,00	29.999.400,00	-600,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.03			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KabupatenKota				100 %	100 %	96.900.000,00	68.982.000,00	63.132.000,00	-33.768.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		111.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.03.0004			Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	96.900.000,00	68.982.000,00	63.132.000,00	-33.768.000,00	Semua KotaKab, Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			111.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			JUMLAH						12.038.816.708,00	11.347.583.220,00	13.540.562.420,00	1.501.745.712,00							12.755.203.413,00	

Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *pihak pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketentraman dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Persentase Penegakan Peraturan Daerah	100 100 100

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Rp 1.566.567.100	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9781016120	Pendukung

PIHAK KEDUA
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 1 Februari 2024
PIHAK PERTAMA
YUDA PRATAMA PUTRA, S.S'
NIP. 19840511 200212 1 001

PIHAK KEDUA
H. PAISAL, SKM, MARS.

Dumai, 1 Februari 2024
PIHAK PERTAMA
YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI IRWANTO, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK PERTAMA

ADI IRWANTO, S.Sos
NIP. 19810808 200604 1 019

PIHAK KEDUA

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertizinannya	Unit	12
2	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	58
3	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kali	12
4	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterbacaan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterbacaan Umum	Kegiatan	12
5	Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterbacaan Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Orang	2

Sasaran 1 : Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	854,800,000	
	1.1	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertizinannya	Rp.	296,980,000	
		1.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp.	38,820,000
		1.3	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Rp.	19,000,000
Sasaran 2 : Meningkatkan Ketertarikan dan Keterbacaan Umum di Kota Dumai	2	Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterbacaan Umum	Rp.	631,026,100	
	2.1	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterbacaan Umum	Rp.	631,026,100	
Sasaran 3 : Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterbacaan Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3	Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterbacaan Umum	Rp.	68,982,000	
	3.1	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Rp.	68,982,000	
Jumlah			Rp.	1,054,808,100	

Dumai, Januari 2024

PIHAK PERTAMA
Kabid Sumber Daya Aparatur

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001

ADI IRWANTO, S.Sos
NIP. 19810808 200604 1 019



**PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEIGA WIRSON, ST, M.AP

Jabatan : Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADI IRWANTO, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

ADI IRWANTO, S.Sos
NIP. 19810808 200604 1 019

PIHAK PERTAMA

MEIGA WIRSON, ST, M.AP
NIP. 19820509 201503 2 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten kota	Kegiatan	12

Sasaran 1 : Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kota Dumai

1 Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Rp. 631,026,100

1.1 Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten kota Rp. 631,026,100

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kabid Sumber Daya Aparatur

ADI IRWANTO, S.Sos
NIP. 19810808 200604 1 019

Pihak Pertama
Kasi Satlinmas

MEIGA WIRSON, ST, M.AP
NIP. 19820509 201503 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RATNA ULFA, S.Kom

Jabatan : Kepala Seksi Data, Informasi dan Pelatihan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADI IRWANTO, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

ADI IRWANTO, S.Sos
NIP. 19810808 200604 1 019

PIHAK PERTAMA

RATNA ULFA, S.Kom
NIP. 19830605 200701 2 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Orang	2

Sasaran 1 :	Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Program Peningkatan Ketenraman dan Ketertiban Umum	Rp. 68,982,000
		1.1 Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Rp. 68,982,000
		Jumlah	Rp. 68,982,000

Dumai, Januari 2024
Pihak Pertama
Kasi Data, Informasi dan Pelatihan

Pihak Kedua
Kabid Sumber Daya Aparatur

ADI IRWANTO, S.Sos
NIP. 19810808 200604 1 019

RATNA ULFA, S.Kom
NIP. 19830605 200701 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GHAZALI, S.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001

PIHAK PERTAMA,

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

Pihak Kedua
KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001

Dumai, Januari 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pengawasan Atas Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Atas Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100
2	Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan penyuluhan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100
3	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100
4	Terlaksananya Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100
5	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100
6	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Persen	100
7	Terlaksananya Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Persen	100

Sasaran 1	Terlaksananya Pengawasan Atas Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	29,999,400
		1.1 Pengawasan Terhadap Kepatuhan Atas Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp	29,999,400
Sasaran 2	Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	49,941,000.00
		2.1 Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp	49,941,000.00
Sasaran 3	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	3. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	49,918,600.00
		3.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp	49,918,600.00
Sasaran 4	Terlaksananya Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	4. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	30,000,000.00
		4.1 Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp	30,000,000.00
Sasaran 5	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	5. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	30,000,000.00
		5.1 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp	30,000,000.00
Sasaran 6	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	6. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	29,880,000.00
		6.1 Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Rp	29,880,000.00
Sasaran 7	Terlaksananya Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	7. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	30,000,000.00
		7.1 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Rp	30,000,000.00
Jumlah Anggaran				249,739,000.00



**PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SAPAWI, SH
Jabatan : POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : GHAZALI, S.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024
PIHAK KEDUA,

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

Dumai, Januari 2024
PIHAK PERTAMA,

AHMAD SAPAWI, SH
NIP. 19820809 201001 1 017

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pengawasan Atas Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Atas Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

Dumai, Januari 2024
Pihak Pertama
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

AHMAD SAPAWI, SH
NIP. 19820809 201001 1 017



**PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMANSYAH, S.Sos, M.IP
Jabatan : KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : GHAZALI, S.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK PERTAMA,

DARMANSYAH, S.Sos, M.IP
NIP. 19820409 200312 1 004

PIHAK KEDUA,

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100
2	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100
3	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Persen	100
4	Terlaksananya Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Persen	100

Sasaran 1	Terlaksananya Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	30.000.000,00
		1,1 Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp	30.000.000,00
Sasaran 2	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	30.000.000,00
		2,1 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp	30.000.000,00
Sasaran 3	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	29.880.000,00
		3,1 Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Rp	29.880.000,00
Sasaran 4	Terlaksananya Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	4 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	30.000.000,00
		4,1 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Rp	30.000.000,00
Jumlah Anggaran				119.880.000,00

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

DARMANSYAH, S.Sos, M.IP
NIP. 19820409 200312 1 004



**PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JHONY HARYANTO, SH
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : GHAZALI, S.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

JHONY HARYANTO, SH
NIP. 19770203 201001 1 010

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100
2	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100

Sasaran 1	Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	49,941,000.00
		1.1 Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp	49,941,000.00
Sasaran 2	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	49,918,600.00
		2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota		49,918,600.00
Jumlah Anggaran				99,859,600.00

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

JHONY HARYANTO, SH
NIP. 19770203 201001 1 010



**PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA WAHYUDI, S.Sos
Jabatan : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. : 19840511 200212 1 001

Dumai, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

EKA WAHYUDI, S.Sos
NIP. 19750901 200112 1 005

Lampiran Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Pelayanan Perkantoran di Satpol PP Kota Dumai	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	%	100
2	Terlaksananya dan tersedianya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100
3	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
4	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100

Pihak Kedua
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001

Dumai, Januari 2024
Pihak Pertama
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

EKA WAHYUDI, S.Sos
NIP. 19750901 200112 1 005



**PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKHA KHAIDIR, SH
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET SATPOL PP KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : EKA WAHYUDI, S.Sos
Jabatan : SEKRETARIS SATPOL PP KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

PIHAK KEDUA

EKA WAHYUDI, S.Sos
NIP. 19750901 200112 1 005

PIHAK PERTAMA

RIKHA KHAIDIR, SH
NIP. 19830321 201001 2 028

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksana dan tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
2	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	2. Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100
3	Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3. Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	100

Sasaran 1 :	Terlaksana dan tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	21.976.100
		1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	4.999.200
		1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	2.496.000
		1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.	2.993.400
		1.4 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Rp.	2.493.400
		1.5 Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp.	2.995.700
		1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	5.998.400
Sasaran 2 :	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	6.584.344.520
		2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	6.572.449.520
		2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	3.953.100
		2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.	3.969.100
		2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.	3.972.800
Sasaran 3 :	Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp.	12.580.700
		3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	3.402.800
		3.2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp.	4.399.300
		3.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	4.778.600
JUMLAH			Rp.	6.618.901.320

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
**SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

EKA WAHYUDI, S.Sos
NIP. 19750901 200112 1 005

Pihak Pertama
**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

RIKHA KHAIDIR, SH
NIP. 19830321 201001 2 028

Lampiran 4 : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024
PIHAK PERTAMA



YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001

PIHAK KEDUA



H. PAISAL, SKM, MARS.


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	%	100
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	%	100
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah	%	100

Sasaran 1 :
Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rp 2.778.090.800,00

Pihak Kedua
WALIKOTA DUMAI



H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai



YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GHAZALI, S.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA,

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001

PIHAK PERTAMA

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100
2	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100

Sasaran 1	Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertibao Umum	Rp	79,941,000.00
		1.1 Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp	79,941,000.00
Sasaran 2	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertibao Umum	Rp	167,721,800.00
		2.1 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp	167,721,800.00
Jumlah Anggaran				247,662,800.00

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SAPAWI, SH
Jabatan : POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : GHAZALI, S.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA,

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

PIHAK PERTAMA,

AHMAD SAPAWI, SH
NIP. 19820809 201001 1 017

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pengawasan Atas Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Atas Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100

Dumai, September 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

Pihak Pertama
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

AHMAD SAPAWI, SH
NIP. 19820809 201001 1 017



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JHONY HARYANTO, SH
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : GHAZALI, S.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA,

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

PIHAK PERTAMA,

JHONY HARYANTO, SH
NIP. 19770203 201001 1 010

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100

Sasaran 1

Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Program Peningkatan Ketezeraman Dan Ketertiban Umum	Rp	79,941,000.00
	1.1 Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp	79,941,000.00
Jumlah Anggaran			79,941,000.00

Dumai, September 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

JHONY HARYANTO, SH
NIP. 19770203 201001 1 010



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMANSYAH, S.Sos M.IP
Jabatan : KEPALA SEKSI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : GHAZALI, S.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA,

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

PIHAK PERTAMA,

DARMANSYAH, S.Sos M.IP
NIP. 19820409 200312 1 004

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100

Sasaran 2

:	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	167.721.800,00
		2.1 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp	167.721.800,00
		Jumlah Anggaran	Rp	167.721.800,00

Dumai, September 2024

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

GHAZALI, S.IP
NIP. 19860326 200701 1 001

Pihak Pertama

KEPALA SEKSI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

DARMANSYAH, S.Sos M.IP
NIP. 19820409 200312 1 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALDI LUBIS, S.Sos., M.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK PERTAMA,

ALDI LUBIS, S.Sos., M.IP
NIP. 19791127 200212 1 002



Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	Persentase pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	Persen	100
2	Terlaksananya koordinasi kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam rangka pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam rangka pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Persen	100
3	Terlaksananya penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Persentase penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Persen	100

Sasaran 1	Terlaksananya pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	1. Program Peningkatan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Rp	1.081.472.400
		1.1 Pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	Rp	1.081.472.400
Sasaran 2	Terlaksananya koordinasi kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam rangka pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	2. Program Peningkatan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Rp	-
		2.1 Koordinasi kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam rangka pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Rp	-
Sasaran 3	Terlaksananya penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	3. Program Peningkatan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Rp	30.000.000
		3.1 Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Rp	30.000.000
		Jumlah Anggaran	Rp	1.111.472.400

Dumai, September 2024

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

ALDI LUBIS, S.Sos., M.IP
NIP. 19791127 200212 1 002





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GANDA PRAWIRANATA, S.STP, M.Si
Jabatan : KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALDI LUBIS, S.Sos., M.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA,

ALDI LUBIS, S.Sos., M.IP
NIP. 19791127 200212 1 002

PIHAK PERTAMA,

GANDA PRAWIRANATA, S.STP., M.Si
NIP. 19930511 201507 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tertaksananya pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Persentase patroli pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Persen	100
		Persentase penertiban gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Persen	100
		Persentase pengamanan kegiatan	Persen	100
2	Tertaksananya penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan uruk rasa dan kerusuhan massa	Persentase penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan uruk rasa dan kerusuhan massa	Persen	100

Sasaran 1	Tertaksananya pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	1. Program Peningkatan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Rp	222.000.000
		1.1 Patroli pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Rp	222.000.000
Sasaran 2	Tertaksananya pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	2. Program Peningkatan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Rp	117.000.000
		2.1 Penertiban gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Rp	117.000.000
Sasaran 3	Tertaksananya pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	3. Program Peningkatan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Rp	366.300.000
		3.1 Pencamanan Kecelakaan	Rp	366.300.000
Sasaran 4	Tertaksananya penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan uruk rasa dan kerusuhan massa	4. Program Peningkatan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Rp	15.000.000
		4.1 Penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan uruk rasa dan kerusuhan massa	Rp	15.000.000
Jumlah Anggaran				720.300.000,00

Dumai, September 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

ALDI LUBIS, S.Sos., M.IP
NIP. 19791127 200212 1 002

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

GANDA PRAWIRANATA, S.STP., M.Si
NIP. 19930511 201507 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDISTIRA ARDHI NUGRAHA, S.Sos
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALDI LUBIS, S.Sos, M.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA,

ALDI LUBIS, S.Sos, M.IP
NIP. 19791127 200212 1 002

PIHAK PERTAMA,

YUDISTIRA ARDHI NUGRAHA, S.Sos
NIP. 19801112 200604 1 009

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Pejabat/Tamu Penting, Pejabat VVIP dan Safari Dakwah Walikota/Wakil Walikota	Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan Pejabat/Tamu Penting	Persen	100
		Pelaksanaan Pejabat VVIP dan Safari Dakwah Walikota/Wakil Walikota	Persen	100

Sasaran 1	Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Pejabat/Tamu Penting, Pejabat VVIP dan Safari Dakwah Walikota/Wakil Walikota	1 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	38.400.000
		1.1 Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan Pejabat/Tamu Penting	Rp	27.000.000
		1.2 Pelaksanaan Pejabat VVIP dan Safari Dakwah Walikota/Wakil Walikota		11.400.000,00
		Jumlah Anggaran	Rp	38.400.000,00

Dumai, September 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

ALDI LUBIS, S.Sos, M.IP
NIP. 19791127 200212 1 002

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN TINDAK INTERNAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

YUDISTIRA ARDHI NUGRAHA, S.Sos
NIP. 19801112 200604 1 009



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARMEN, SH., M.Si
Jabatan : POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALDI LUBIS, S.Sos., M.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA,

ALDI LUBIS, S.Sos., M.IP
NIP. 19791127 200212 1 002

PIHAK PERTAMA,

ARMEN, SH., M.Si
NIP. 19831214 201001 1 016

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya koordinasi kerja sama antar lembaga dan kemirraan dalam rangka pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi kerja sama antar lembaga dan kemirraan dalam rangka pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Persen	100

Sasaran 1	Terlaksananya koordinasi kerja sama antar lembaga dan kemirraan dalam rangka pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	1 Program Peningkatan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Rp	-
		1.1 Koordinasi kerja sama antar lembaga dan kemirraan dalam rangka pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Rp	-
		Jumlah Anggaran	Rp	-
		Dumai, September 2024		

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

ALDI LUBIS, S.Sos., M.IP
NIP. 19791127 200212 1 002

Pihak Pertama
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

ARMEN, SH., M.Si
NIP. 19831214 201001 1 016



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA WAHYUDI, S.Sos
Jabatan : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001

Dumai, September 2024
PIHAK PERTAMA

EKA WAHYUDI, S.Sos
NIP. 19750901 200112 1 005

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Pelayanan Perkantoran di Satpol PP Kota Dumai	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	%	100
2	Terlaksananya dan tersedianya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100
3	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
4	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100

Pihak Kedua

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

EKA WAHYUDI, S.Sos
NIP. 19750901 200112 1 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKHA KHAIDIR, SH
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET SATPOL PP KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : EKA WAHYUDI, S.Sos
Jabatan : SEKRETARIS SATPOL PP KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2024

PIHAK KEDUA

EKA WAHYUDI, S.Sos
NIP. 19750901 200112 1 005

PIHAK PERTAMA

RIKHA KHAIDIR, SH
NIP. 19830321 201001 2 028

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksana dan tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
2	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100
3	Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	100

Dumai, 25 September 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

EKA WAHYUDI, S.Sos
NIP. 19750901 200112 1 005

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

RIKHA KHAIDIR, SH
NIP. 19830321 201001 2 028

Lampiran 5 : Pengukuran Kinerja Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	
Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang di tindak lanjuti}}{\text{jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima}} \times 100\%$	100 %	$\frac{70}{70} \times 100 \%$	=100%
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan).	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3}} \times 100\%$	100%	$\frac{802}{802} \times 100 \%$	=100%
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah.	$\frac{\text{Jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan}}{\text{jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi}} \times 100\%$	100%	$\frac{12}{20} \times 100 \%$	= 60%

Dumai, Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DUMAI

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19840511 200212 1 001

Lampiran 6 : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.778.090.800	2.717.797.692
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	2.437.296.100	2.383.541.592
1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.325.816.100	1.313.273.592
2	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	1.081.480.000	1.040.768.000
3	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	30.000.000	29.500.000
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	277.662.700	273.015.000
1	Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	79.941.000	77.932.000
2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	167.722.300	165.986.000
3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.999.400	29.097.000
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	63.132.000	61.241.100
1	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	63.132.000	61.241.100
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.762.471.620	9.955.128.294
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.976.100	15.464.400
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.200	2.700.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.496.000	2.297.600
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.993.400	1.500.000

	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.493.400	2.399.000
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.995.700	2.250.000
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.998.400	4.317.800
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.573.329.720	6.383.185.431
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.526.828.720	6.339.840.948
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.307.100	20.724.783
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.221.100	20.219.700
	4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis dan Prognosis Realisasi Anggaran	3.972.800	2.400.000
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.580.700	11.494.000
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	3.402.800	3.401.000
	2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.399.300	4.239.000
	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.778.600	3.854.000
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.445.000	28.500.000
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	29.445.000	28.500.000
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	654.299.200	628.093.900
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.423.000	22.272.400
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.864.700	61.431.500
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.999.900	113.778.000
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.651.600	12.252.000
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.360.000	27.360.000
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391.000.000	391.000.000
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.774.560	0

	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.774.560	0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.683.220.340	2.448.780.967
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.800.000	6.800.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.000.000	135.833.207
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.000.000	228.000.000
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.304.420.340	2.078.147.760
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		650.846.000	439.609.596
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.000.000	38.000.000
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	374.026.000	373.673.596
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.820.000	27.936.000
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	0

Dumai, Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DUMAI**



YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19840511 200212 1 001